KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Anggaran Reses DPR 2014 capai Rp 994,9 Miliar
Tanggal : Selasa, 09 Desember 2014
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : A6

Anggaran Reses DPR 2014 Capai Rp 994,9 Miliar

[JAKARTA] Anggaran reses DPR setiap tahun terus bertambah. Pada tahun 2012, anggaran reses DPR dalam bentuk "rangka penyerapan aspirasi DPR" sebesar Rp 539.481.045.000, dan pada tahun 2013 sebesar Rp 678.431.305.000.

"Jadi alokasi anggaran reses kenaikan dari tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp 138.950.260.000.

Sedangkan alokasi anggaran reses pada tahun 2014 sebesar Rp 994.904.572.000. Jadi dari tahun 2013 ke 2014 ada kenaikan anggaran reses sebesar Rp 316.471.267.000," ujar Pengamat Anggaran Politik Uchok Sky Khadafi kepada *SP* di Jakarta, Senin (8/12).

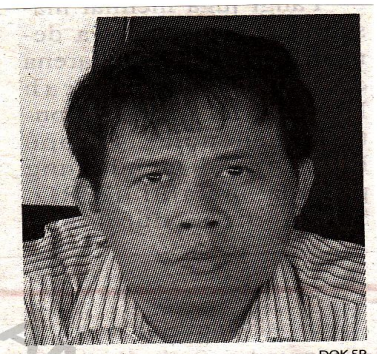
Menurut Uchok, kenaikan alokasi anggaran dari tahun 2013 ke 2014 cukup tinggi dan mahal. Kenaikan anggaran reses DPR dari tahun 2013 ke 2014 sebanyak 44 persen atau sebesar Rp 316,4 miliar.

Selanjutnya dipaparkan Uchok, bila disimulasikan, alokasi anggaran reses sebesar Rp 994.9 miliar dibagi sebanyak 560 orang anggota dewan. Maka setiap orang akan menerima sebanyak Rp 1,7 miliar per tahun.

"Dan, setiap tahun ada 11 reses, maka setiap reses atau berkunjung ke dapil masing-masing, maka anggota dewan akan membawa uang kegiatan reses sebesar Rp 161.510.158 juta per kegiatan," katanya.

Untuk saat ini, kata dia, tinggi dan mahal biaya reses ini hanya akan menambah mubazir anggaran dari pajak rakyat ini. Dikatakan mubazir karena, tujuan dan fungsi reses itu sudah mandul karena kegiatannya juga membosankan konstituen, dan dewan tidak bisa membawa aspirasi rakyat ke tingkat nasional.

"Bagaimana mau memperjuangkan aspirasi rakyat? Antara dewan sendiri, antar fraksi atau partai, dan kelompok kerjanya hanya berantem melulu. Akan lebih baik disediakan oleh pemerintah Jokowi sebuah "Ring Tinjau" saja di DPR agar "pertarungan berantem" ini, tidak liar, dapat ditonton oleh seluruh rakyat," katanya



DOK SP

Uchok Sky Khadafi

Melukai Rakyat

Anggota Dewan Pendiri Lembaga Kajian Strategis Nasional Irwan Suhanto kenaikan anggaran reses yang naik 44 persen telah melukai hati rakyat. Musim reses kali ini, kata Irwan, sebenarnya memperlihatkan bahwa DPR berkonflik soal beberapa hal terkait kepentingan politik tapi bisa 'rujuk' kalau soal menambah anggaran.

"Begini, dibanyak kasus reses yang berfungsi sebagai alat bagi anggota dewan ke dapil justru dimanipulasi dengan cara hanya bikin acara makan-makan, temu kangen. Yang terpnting bagi

mereka adalah daftar absen sebagai bukti telah menjalankan reses," kata Irwan. Yang paling ekstrim, kata dia, adalah memanipulasi seakan-akan ada reses, padahal daftar absennya di rekayasa. Uangnya sebagian dibagikan dan sebagian dipakai untuk kepentingan pribadi. Padahal fungsi reses adalah menyerap aspirasi rakyat sekaligus menyampaikan pencapaian anggota dewan. Dan lagi secara etik-moral, kenaikan anggaran reses sangat tidak simetris dengan pencapaian mereka sebagai anggota dewan.

Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI) Ronal Rofiandri menjelaskan, kinerja DPR periode 2014-2019 pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2014-2015 jika dibandingkan DPR periode 2009-2014 pada rentang waktu yang sama (Oktober 2009 setelah pelantikan hingga pertengahan Desember 2009), khususnya pada fungsi legislasi, mengalami kemunduran. Tradisinya seperti periode lalu, DPR seharusnya telah menghasilkan Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2015 dan meresmikannya dalam Keputusan DPR.

"Kemungkinan besar Prolegnas baru akan disusun dan dibahas bersama pemerintah pada masa sidang yang akan datang. Kisruh politik di internal DPR menjadi penyebab utama yang kemudian berimbas pada belum terbentuknya Alat Kelangkapan Dewan (AKD) terutama Baleg," ujar Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI) Ronal Rofiandri kepada *SP* di Jakarta, Jumat (5/12).

Menurut Ronald, Baleg sendiri baru sebatas menggelar RDPU dalam menyiapkan usulan Prolegnas. Di satu sisi, kata dia, Pemerintah dan DPD sedikit diuntungkan dari segi proses penyiapan Prolegnas (usulan Pemerintah maupun DPD) karena bisa mengoptimalkan waktu yang seharusnya dijadwalkan untuk membahas Prolegnas bersama DPR.

Sedangkan bagi DPR, seharusnya mereka tetap bisa menjadwalkan penyiapan Prolegnas, dengan catatan memundurkan waktu reses atau menggunakan masa reses untuk bekerja sebagaimana dimungkinkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Tatib DPR. Terobosan ini sebenarnya menyangkut integritas dan akuntabilitas DPR sekaligus mengkonfirmasi DPR siap "move on" dari kisruh politik yang mendera selama ini.

"Ini catatan baru sebatas proses penyiapan Prolegnas. Kita belum masuk ke pilihan RUU yang mau diusulkan dan diprioritaskan," ucapnya. Publik, sambung dia, menantikan juga apakah DPR bisa "move on" pula menunjukan posisi keberpihakannya, misalkan pada pembaruan hukum pidana melalui RUU KUHAP dan RUU KUHP, atau penataan lembaga perwakilan khususnya relasi dengan DPD melalui revisi UU MD3 dan UU 12/2011. Hal lain yang patut dicermati oleh publik adalah apakah pengusulan maupun prioritas sejumlah RUU dalam Prolegnas turut juga memperlihatkan polarisasi politik terkini di DPR antara KMP dan KIH. [H-14]